

RINGKASAN

Maulidar Sh Putri
NIM 220510352

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

**(Sumiadi, S.H., M.Hum. dan Fitri Magfirah S.H.,
M.H.)**

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan lingkungan yang dilarang tegas dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kabupaten Aceh Tengah mengalami kebakaran hutan dan lahan secara berulang dengan 831 titik kebakaran selama periode 2021–2025

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Tengah serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, menggunakan pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif dengan data dari wawancara Polres Aceh Tengah, Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, KPH Wilayah VII Aceh, BPBD, dan masyarakat, serta studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 831 titik kebakaran hanya terdapat 9 laporan yang ditangani Polres Aceh Tengah dan 6 perkara yang memperoleh putusan pengadilan, sehingga penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif, dinilai dari proses penegakan hukum yang tidak konsisten, lemahnya kinerja pengawasan aparat sebagai aspek paling dominan, sanksi yang belum menjangkau keseluruhan pelaku, serta lemahnya efek jera. Hambatan penegakan hukum bersumber dari tiga faktor, yaitu faktor kelembagaan sebagai faktor paling dominan, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat, yang meliputi sulitnya menemukan pelaku, keterbatasan kapasitas dan koordinasi antarinstansi, kondisi geografis dan keterbatasan fasilitas pembuktian, serta minimnya partisipasi, hilangnya rasa memiliki terhadap hutan, kebiasaan membakar lahan, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Oleh karena itu diperlukan penguatan patroli dan pemanfaatan teknologi hotspot, koordinasi antarinstansi melalui nota kesepahaman, dukungan anggaran daerah, serta pembentukan kelompok masyarakat penjaga hutan berbasis kampung untuk menumbuhkan kesadaran bahwa hutan adalah milik bersama yang harus dijaga.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Efektivitas Hukum.

SUMMARY

Maulidar Sh Putri
NIM 220510352

***ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN
FOREST AND LAND FIRE CASES IN CENTRAL
ACEH REGENCY***

**(Sumiadi, S.H., M.Hum. dan Fitri Magfirah S.H.,
M.H.)**

Forest and land fires are an environmental crime expressly prohibited under Article 69 paragraph (1) letter h of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Article 50 paragraph (3) letter d of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. Central Aceh Regency experiences recurring forest and land fires, with 831 fire hotspots recorded during the period of 2021–2025.

This study aims to analyze the effectiveness of environmental law enforcement in forest and land fire cases in Central Aceh Regency and to identify the obstacles encountered, using an empirical juridical approach with a descriptive nature, with data collected through interviews with the Central Aceh Resort Police, District Prosecutor's Office, Forest Management Unit Region VII Aceh, BPBD, and community members, supported by library research.

The results show that of 831 fire hotspots, only 9 cases were handled by the Central Aceh Resort Police and only 6 resulted in court decisions, indicating that environmental law enforcement has not been effective, assessed from the inconsistent enforcement process, weak supervisory performance of the apparatus as the most dominant aspect, sanctions that have not reached the majority of perpetrators, and weak deterrent effect. The obstacles stem from three factors, namely institutional factors as the most dominant, facility factors, and community factors, including difficulty identifying perpetrators, limited capacity and inter-agency coordination, challenging geographical conditions and limited evidence facilities, as well as low participation, loss of forest ownership, land-burning habits, and low public trust in the legal system.

Therefore, strengthening patrols and hotspot technology utilization, inter-agency coordination through a memorandum of understanding, local budget support, and the establishment of village-based forest guardian groups are recommended to build awareness that forests are a shared responsibility.

Keywords: Environmental Law Enforcement, Forest and Land Fires, Legal Effectiveness